



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WINSYAHPUTRA RITONGA**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG UMUM DAN KEUANGAN**
3. NHK : **761644**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.425.000.000**

1. Tanah Seluas 371 m2 di KAB / KOTA DELI SERDANG, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000
2. Tanah Seluas 20 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 20 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 12 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
5. Tanah Seluas 17 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
6. Tanah Seluas 15 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Tanah Seluas 10 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
8. Tanah Seluas 21 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
9. Tanah Seluas 2 m2 di KAB / KOTA LANGKAT, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 163.000.000**



1. MOTOR, HIONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
6.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp.
150.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	525.213.776
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.113.213.776
III. HUTANG	Rp.	928.500.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.184.713.776

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.